

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki potensi besar untuk semakin berkembang. Bank Perkreditan Rakyat Syariah merupakan lembaga keuangan berbentuk bank yang dalam kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 terjadi perubahan dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Sumitro (2004:130), konsep dasar operasional BPRS sama dengan dengan konsep dasar operasional pada Bank Muamalat Indonesia, yaitu: 1) Sistem simpanan murni (*al-wadiah*), 2) Sistem bagi hasil, 3) Sistem jual beli dan marjin keuntungan, 4) Sistem sewa, dan 5) Sistem upah (*fee*). BPRS merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil terutama yang berada di kecamatan dan pedesaan. Jenis produk yang ditawarkan oleh BPRS relatif sempit jika dibandingkan dengan bank umum, bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh BPRS, seperti pembukaan rekening giro dan ikut kliring. Tujuan berdirinya suatu BPRS adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, menambah lapangan kerja baru, memberikan manfaat dan kebaikan bagi orang yang membutuhkan serta membina semangat *ukhuwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.

BPRS didesain khusus dengan jaringan tertentu dan fungsi yang terbatas tidak seperti bank umum. Dalam menjalankan usahanya, BPRS juga memiliki aturan yang ketat dalam pemberian pembiayaan seperti dalam memberikan pembiayaan pihak BPRS harus bisa memastikan bahwa calon nasabah pembiayaan dapat menyelesaikan pinjamannya sesuai dengan waktu jatuh tempo yang telah disepakati untuk menghindari adanya risiko gagal bayar atau kredit macet. Pendirian BPRS diharapkan menjadi suatu lembaga perbankan andalan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat menengah di masing-masing daerah yang memiliki karakteristik dan kondisi regional yang berbeda-beda yang belum terjangkau oleh bank umum khususnya masyarakat yang tinggal di pedesaan (Nugrohowati, 2019). Kehadiran BPRS sangat dibutuhkan untuk menjadi partner pemerintah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi Indonesia khususnya di daerah-daerah pinggiran yang tidak terjangkau bank umum dan diharapkan bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk menjangkau dan memberikan kontribusinya untuk mensejahterahkan kehidupan masyarakat mikro. Keberadaan lembaga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan bank umum, yaitu BPRS dapat memberikan layanan perbankan dengan proses yang mudah, pencairan pembiayaan dengan cepat, sederhana, dan tidak memerlukan persyaratan yang rumit seperti dalam bank umum kepada masyarakat menengah kebawah khususnya bagi UMKM yang berada di pedesaan maupun perkotaan untuk lebih mengembangkan usahanya (Anggriani, Amaliah, & Julia, 2019; Ayuningtyas, Wati, & Safa'ah, 2018; BI, 2008; Fauzi, 2018; Muhammad, 2007; Nugrohowati, 2019; Sholihin, Zaki, & Maulana, 2018;

Trinugroho, Risfandy, & Doddy, 2018). Selain itu dalam menjangkau pangsa pasarnya BPRS melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat dengan mendatangi langsung para calon nasabah baik yang ingin menabung maupun membutuhkan pembiayaan (Ayuningtyas et al., 2018; Puspaningtyas, 2019).

Semakin menurunnya pertumbuhan aset Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dari tahun ke tahun disebabkan oleh berbagai permasalahan yang muncul dalam pengembangan bisnis BPRS. Persaingan merupakan salah satu permasalahan yang timbul dalam pengembangan BPRS (Oppong & Masahudu, 2014; Rizvi, Narayan, Sakti, & Syarifuddin, 2019). Lingkungan persaingan bagi BPRS menjadi semakin ketat bukan hanya persaingan antara BPRS itu sendiri melainkan juga dengan BPR, Bank, LKMS, BMT, dan lembaga lain yang memiliki pangsa pasar yang sama. Dengan adanya persaingan yang ketat antar BPRS dan juga dengan BPR di suatu daerah mengakibatkan BPRS mengalami berbagai hambatan untuk lebih berkembang dan bisa bersaing dengan para pesaingnya. Selain itu, dengan semakin tingginya NPF, skala usaha BPRS yang lebih kecil daripada bank umum, dan biaya dana yang mahal serta kendala-kendala lainnya mengakibatkan beberapa BPRS susah berkembang dan dinilai tidak sehat sehingga harus dilikuidasi. Dengan ditambahnya peraturan OJK tentang kenaikan modal minimum yang harus dimiliki untuk pendirian BPRS, banyak BPRS yang menjadi kesulitan untuk mendirikan cabang-cabang baru karena kesulitan memperoleh modal. Dalam menghadapi keadaan tersebut BPRS harus dapat berkompetisi dengan kompetitor lainnya. Selain itu, untuk lebih mengembangkan bisnisnya BPRS harus menemukan solusi-

solusi dan strategi yang tepat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi.

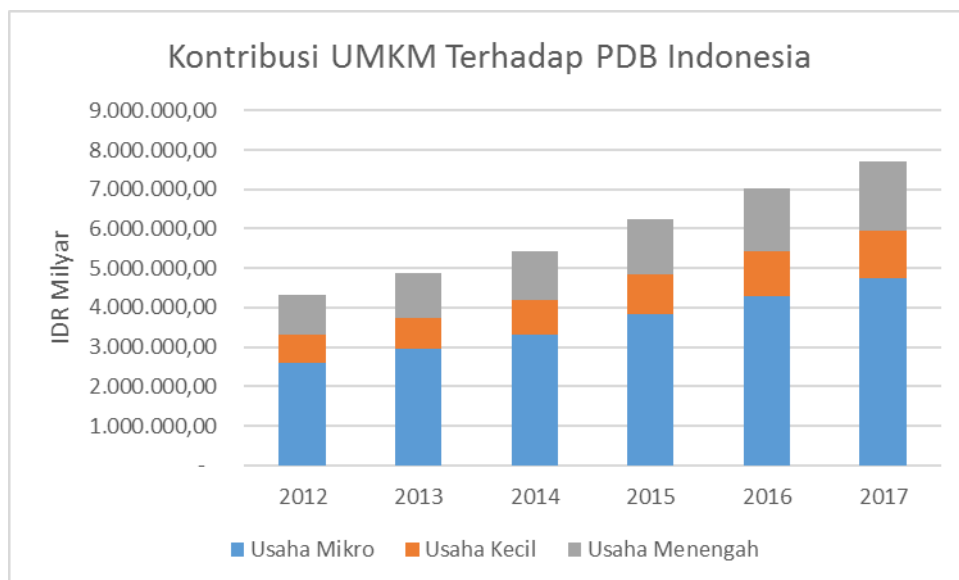
Perkembangan keberadaan BPRS yang pesat di Indonesia ini tidak didukung oleh faktor-faktor pendukung yang memungkinkan BPRS untuk terus berkembang dan menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik diantaranya adalah dengan kurangnya layanan digital yang dimanfaatkan oleh BPRS dalam kegiatan bisnisnya. Dengan melihat fenomena di atas, perkembangan BPRS dipandang belum menjawab masalah ekonomi yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Menurut Sudarsono (2013:102) dalam prakteknya BPRS mengalami berbagai kendala, kendala tersebut di antaranya adalah kiprah BPRS yang kurang dikenal masyarakat sebagai BPR yang berprinsipkan syariah, sumber daya manusia yang dimiliki BPRS, dan kurang adanya koordinasi baik di antara BPRS maupun dengan lembaga lainnya. Oppong & Masahudu (2014) dalam penelitiannya menyebutkan terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh BPR yaitu, persaingan global, kuantitas dan kualitas SDM, infrastruktur, peraturan perundang-undangan, modal, teknologi, manajemen edukasi dan penelitian SDM.

Jumlah BPRS selama beberapa tahun ini relatif fluktuatif, dilihat dari data statistik Perbankan Syariah Juni 2019 jumlah BPRS di Indonesia berkurang empat dari 167 BPRS pada Desember 2018 menjadi 163 BPRS pada Oktober 2019, jumlah populasi terbesar BPRS di pulau Jawa berada di wilayah Jawa Barat sebanyak 28 BPRS, sedangkan untuk wilayah di luar pulau Jawa jumlah BPRS terbanyak berada di Lampung sebanyak 11 BPRS. Adanya penurunan jumlah BPRS dari Desember 2018 hingga Juni 2019 dikarenakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin

usaha PT. BPRS Safir Bengkulu di wilayah Bengkulu pada tanggal 30 Januari 2019, PT. BPRS Jabal Tsur di Pasuruan-Jawa Timur pada tanggal 21 Januari 2019, PT. BPRS Muamalat Yotefa di Papua pada tanggal 15 Mei 2019, dan PT. BPRS Hareukat di Aceh Besar pada tanggal 11 Oktober 2019. Pencabutan izin usaha ini berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.5/KDK.03/2015 tentang pencabutan izin usaha pada ketiga BPRS di atas. Likuidasi yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini dikarenakan kondisi bank yang tidak sehat padahal sudah diberi kesempatan oleh OJK untuk memperbaiki tingkat kesehatannya tersebut. Hal ini tentu menambah kendala bagi BPRS untuk semakin berkembang.

Kehadiran BPRS bagi pangsa pasarnya yaitu masyarakat mikro sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan usahanya (Megicks, Mishra, & Lean, 2005). Karena potensi pangsa pasar BPRS yang besar, sangat memungkinkan BPRS untuk lebih mengembangkan eksistensinya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat mikro khususnya di daerah pedesaan (Shahinpoor, 2009). BPRS memiliki potensi pangsa pasar yang tinggi khususnya dalam membantu pengembangan UMKM di tiap daerah di Indonesia. Pengembangan UMKM sangat diperlukan karena UMKM sendiri memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Jaringan UMKM yang tersebar di berbagai daerah yang dapat membantu kehidupan masyarakat menjadi lebih baik lagi sama dengan tujuan didirikannya BPRS. Berdasarkan data dari Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 dan Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap PDB dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2017, kontribusi UMKM terhadap

PDB mencapai Rp 7.704.635,90 milyar dengan pertumbuhan sebesar 60 persen dari total usaha yang ada yaitu, usaha mikro menyumbang sebesar 36,82 persen, usaha menengah 13,57 persen, dan usaha kecil sebesar 9,61 persen.



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2017)

Gambar 1.1 Kontribusi UMKM Terhadap PDB Indonesia

Eksistensi BPRS memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi syariah dalam memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi berbasis kerakyatan di Indonesia (Sholihin et al., 2018). BPRS memiliki posisi vital dalam membantu perkembangan perekonomian di Indonesia karena sekitar 99% bisnis di Indonesia termasuk dalam kategori usaha kecil dan menengah (Shaban, Duygun, Anwar, & Akbar, 2014). Posisi BPRS di pasar perbankan Indonesia menjadi penting karena sesuai pangsa pasarnya, BPRS diharuskan untuk menjangkau pengusaha kecil yang tidak ingin memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional (Trinugroho et al., 2018). Hal ini menunjukkan peranan BPRS sangat berarti dalam membantu pengusaha kecil dan menengah (UMKM) khususnya di bidang permodalan. Oleh karena itu, BPRS

harus menjalankan perannya untuk menyalurkan dananya dalam sektor UMKM untuk lebih mengembangkan UMKM di Indonesia..

Kehadiran BPRS sangat dibutuhkan masyarakat terutama di kalangan mikro karena kegiatan BPRS berfokus untuk memberikan pelayanan bagi UMKM yang membutuhkan pembiayaan dengan proses yang mudah, pelayanan yang cepat, dan persyaratan yang lebih ringan daripada persyaratan di Bank Umum. Hal ini dikarenakan BPRS dapat menjadi solusi bagi UMKM yang memiliki keterbatasan terutama dalam memenuhi persyaratan pembiayaan di Bank Umum (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2019). Akan tetapi disisi operasionalnya masih memiliki banyak kelemahan (Rahman & Dean, 2013). Dalam menjalankan bisnisnya BPRS tidak terlepas dari risiko yang siap menghadang dalam perkembangan BPRS itu sendiri karena kondisi BPRS sangat bergantung pada apakah BPRS tersebut mampu menghadapi setiap permasalahan yang sedang dihadapinya, mampu meningkatkan layanan didaerah pendirian BPRS, mampu untuk memperluas pasar didaerahnya, dan mampu untuk mencari SDM yang unggulan serta dapat melakukan modernisasi dengan pengembangan teknologi informasi. Maka dari itu, problematika yang dihadapi harus dapat di atasi agar mampu menciptakan citra positif terhadap BPRS.

Menurut Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia pada tahun 2019, terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perbankan syariah di Indonesia, antara lain cukup besarnya potensi pasar yang dimiliki tidak diimbangi dengan pertumbuhan pangsa pasar yang ada mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, Kuantitas dan kualitas SDM serta teknologi informasi yang belum

bisa mendukung pengembangan produk dan layanan perbankan, dan edukasi serta sosialisasi yang dilakukan belum merata dan menyentuh masyarakat luas. Menurut Oppong & Masahudu (2014) dalam penelitiannya di Ghana, tantangan yang dihadapi oleh BPR adalah persaingan global, kuantitas dan kualitas SDM, infrastruktur, peraturan perundang-undangan, modal, teknologi, manajemen. Sedangkan menurut Megicks et al. (2005), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa permasalahan yang ada dalam pengembangan BPR di India adalah kurangnya inovasi produk, layanan dan teknologi. Secara garis besar, terdapat banyak permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan BPRS di Indonesia diantaranya adalah persaingan, permodalan, produk kurang inovatif, kuantitas dan kualitas SDM, manajemen yang buruk, kurangnya pemahaman dan pemakaian teknologi informasi, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya, banyak peneliti yang lebih tertarik untuk meneliti tentang kendala pengembangan bank syariah (Bello & Abubakar, 2014; Rassool, 2018; Sharofiddin, Fauzi Bin Idris, & Hasan Abdullah Othman, 2018; Tabash, 2017; Yanıkkaya & Pabuçcu, 2017), lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) (Rahman & Dean, 2013; A. S. Rusydiana & Devi, 2012), serta BMT (Nurasyiah, Aprilliani Utami, W. Mahri, & Firmansyah, 2016; Rusby & dkk, 2016; A. Rusydiana & Devi, 2013), sedangkan sangat sedikit peneliti yang membahas tentang permasalahan yang terjadi dalam pengembangan BPRS di Indonesia (Husein, 2015; Megicks et al., 2005; Oppong & Masahudu, 2014). Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut dalam menganalisis permasalahan BPRS di Jawa Timur masih menggunakan analisis deskriptif, sedangkan penelitian

ini berusaha menganalisis dengan metode ANP yang memiliki keunggulan dalam hasil penelitian dengan menunjukkan prioritas dari masing masing permasalahan. Penggunaan ANP disini diharapkan dapat membuat hasil penelitian lebih aplikatif.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan yang mendorong dilakukannya penelitian, terdapat beberapa pertanyaan penelitian yang harus dijawab dalam penelitian, yaitu:

1. Apa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan BPRS di Indonesia?
2. Bagaimana alternatif solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan BPRS di Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui alternatif solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat membantu BPRS di Jawa Timur dalam mengembangkan usahanya secara efektif dan efisien serta untuk pertimbangan dalam membuat kebijakan dalam pengelolaan usaha BPRS di Jawa Timur.

2. Peneliti dapat meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi, menganalisa, serta menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut sebagai perwujudan dan aplikasi ilmu yang telah diterima.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan acuan atau perbandingan dalam melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan pemetaan masalah dan pemilihan solusi.

1.5 Sistematika Tesis

Secara garis besar, sistematika penelitian tesis ini terdiri dari lima bab yang mengikuti buku pedoman penulisan tesis Universitas Airlangga. Adapun lima bab tersebut terdiri dari:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab 1 ini merupakan bagian awal dari penulisan tesis. Pendahuluan ini berisi: latar belakang masalah di mana dalam latar belakang ini dijelaskan tentang perkembangan, dan permasalahan yang terjadi dalam pengembangan BPRS di Jawa Timur yang akhirnya mendorong peneliti untuk melaksanakan penelitian. Kemudian adapun penjelasan tentang pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika tesis.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 ini menjelaskan teori-teori yang menjadi landasan penelitian. Di dalam bab ini terdapat uraian tentang deskripsi konseptual, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bab 3 memuat penjelasan tentang data penelitian yang diperlukan dan diperoleh dari teknik komunikasi langsung maupun tidak langsung. Dalam bab ini mencakup penjelasan tentang rasionalitas jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, jenis data dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang diperlukan.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab 4 ini membahas tentang analisa data dengan menyajikan hasil estimasi setelah melalui metodologi yang sudah dijelaskan. Pada bab ini mencakup penjelasan tentang gambaran umum objek dan subjek penelitian, hasil penelitian yang didapatkan, serta pembahasan tentang hasil penelitian yang sudah diperoleh.

BAB 5 PENUTUP

Pada bab 5 ini peneliti mengungkapkan kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dan saran serta keterbatasan penelitian agar menjadi masukan dan dapat diperbaiki untuk penelitian selanjutnya.